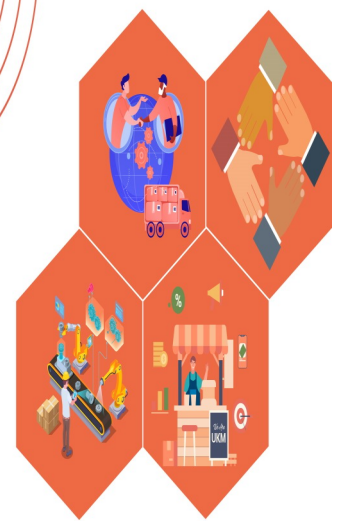


LKIP 2020



**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH.
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Jak
Preneur
Jakarta**
a city of collaboration



[@dinasppkum](https://www.instagram.com/dinasppkum) | [facebook.com/dinasppkumdki](https://www.facebook.com/dinasppkumdki) | [@KUMMPDKIJKT](https://twitter.com/KUMMPDKIJKT) | dinasppkum.jakarta.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2020**

LKIP 2020
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah S.W.T. karena kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dengan baik.

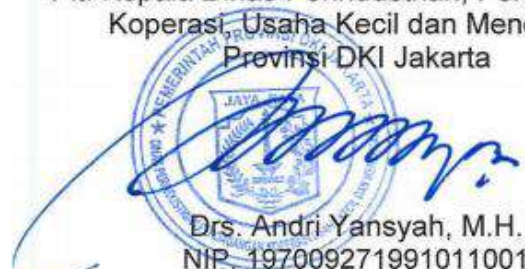
LKIP Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

LKIP Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 melaporkan realisasi, hambatan dan upaya solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. Disamping itu, LKIP tahun 2020 juga melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020, terhadap manfaat yang diterima oleh negara dan masyarakat.

Demikian Laporan ini dibuat dan kami berharap LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi.

Jakarta, 31 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Andri Yansyah, M.H.
NIP. 197009271991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1. GAMBARAN UMUM	7
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	8
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	10
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP 2020	11
1.5. SISTEMATIKA LKIP 2020	12
BAB II	
RENCANA STRATEGIS	14
2.1. VISI DAN MISI	15
2.2. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI	18
2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2020	23
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	36
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020	40
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2020	43
3.4 ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN FAKTOR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020	46
BAB IV	
PENUTUP	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setelah memasuki era reformasi perubahan demi perubahan di tubuh pemerintah Republik Indonesia terus terjadi, tuntutan agar pemerintahan dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat.

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun sejak tanggal 21 April 2014, Inpres tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta ke depan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sentralisasi dan desentralisasi bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Itulah sebabnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara optimal, demokratis, bertanggungjawab, transparan dan responsive sesuai amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan maupun perkembangan yang semakin sulit dan kompleks saat ini, kelembagaan baru Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada

masyarakat dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah dibebankan disajikan beberapa hal berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.
4. Pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Peningkatan Pelaku Kewirausahaan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar 257,04% ekuivalen 100% (Sangat Memuaskan), yaitu terealisasi sebanyak 85.746 Pelaku Usaha dengan rincian 59.449 UMKM dan 26.297 IKM dari Target 27.799 UMKM dan 5.560 IKM. Sedangkan untuk Realisasi Anggarannya atas Program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja mencapai 95,79% atau sebesar Rp. 85.829.033.828 dari Rp. 89.600.414.554 anggaran di APBDP 2020
5. Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2020 mencapai nilai 96,99% atas 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Program.
6. Penyerapan anggaran Belanja Langsung Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 beserta Sudin dan UPT mencapai 95,79% yaitu sebesar Rp.85.829.033.828 dari Rp.89.600.414.554, sedangkan penyerapan keseluruhan baik Belanja langsung maupun Belanja Tidak Langsung mencapai 91,95% atau sebesar Rp.164.076.135.211 dari

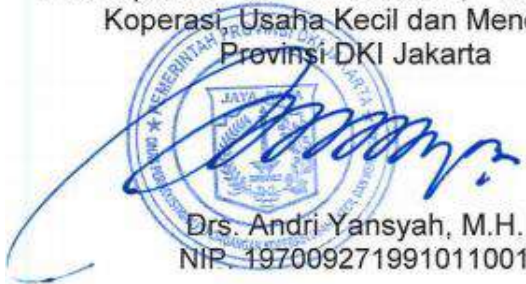
Langsung mencapai 91,95% atau sebesar Rp.164.076.135.211 dari Rp.178.440.134.884

7. Berdasarkan Analisis Akuntabilitas atas Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020, maka dapat disampaikan simpulan bahwa Capaian seluruh faktor penyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 sebesar 95,56%. Dengan demikian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berada pada level AA (Sangat Memuaskan),

Demikian Ikhtisar eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari hasil LKIP selengkapnya.

Jakarta, 31 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Andri Yansyah, M.H.
NIP. 197009271991011001

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Pada akhir Tahun 2019, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan mengalami restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dimana Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan bergabung dengan Bidang Industri yang merupakan pecahan dari Dinas Perindustrian dan Energi. Penggabungan Dinas KUKMP dengan Bidang Industri ini diikuti dengan 2 (dua) unit lainnya yaitu Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dan Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu mengacu pada prinsip-prinsip good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan Legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan hasil pembangunannya dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Dalam pasal 58 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu pemerintahan telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Perpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik Kementerian Negara/Lembaga maupun SKPD untuk menyelenggarakan SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP dimaksud meliputi :

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja;
- f. rewiu dan evaluasi Kinerja.

Jadi, sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), setiap penyelenggara pemerintah harus melaksanakan pelaporan kinerja, dimana dalam penyusunan Laporan Kinerja tersebut setiap instansi pemerintah dapat menjelaskan secara ringkas dan lengkap capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Petunjuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara berjenjang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Kedudukan:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya aspek strategis dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian integral dari Organisasi Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan mendukung Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel

Tugas:

Berdasarkan Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PPKUKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan, perdagangan dan kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
- i. pelaksanaan penjaminan keteersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
- m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
- n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
- p. pelaksanaan pengujian mutu barang;
- q. pelaksanaan pelatihan perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tern ulang dan pengawasan;
- s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
- w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- bb. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Kepegawaian
 3. Subbagian Program dan Pelaporan
 4. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Industri
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah
 3. Seksi Industri Kreatif dan Digital.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 3. Seksi Pemasaran.
- e. Bidang Koperasi, terdiri dan :
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Koperasi
 3. Seksi Pembiayaan Koperasi
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah
 3. Seksi Usaha Informal
- g. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Perindustrian dan Kemetrolcgian
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan
 3. Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- h. Suku Dinas Kota dan Suku Dinas Kabupaten
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP 2020

Esensi dari sistem LKIP bagi Dinas adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian ini merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis dinas dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kerja Dinas. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur dan pihak – pihak terkait atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas atas capaian kinerja yang berhasil atau belum berhasil diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran telah dicapai selama Tahun 2020.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gap) yang ditemukan, manajemen Dinas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

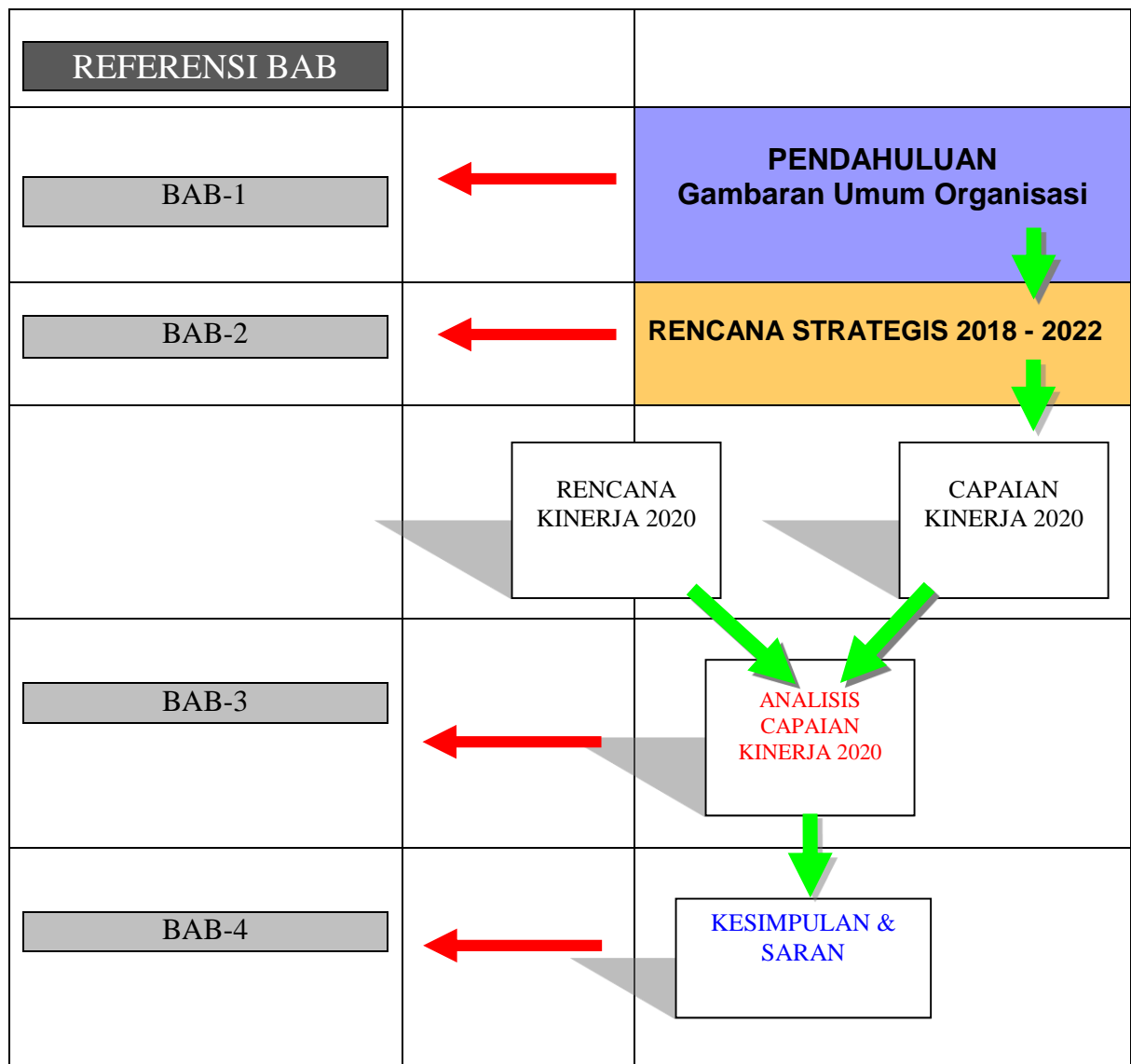
1.5. SISTEMATIKA LKIP 2020

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun

2020, capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (performance plan) merupakan ukuran keberhasilan tahunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa tahun-tahun mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Sistematika LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dalam bagan berikut:



BAB II

RENCANA STRATEGIS

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 selaras dengan visi misi Gubernur melalui implementasi sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2.1. VISI dan MISI

A. Visi

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra, visi yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selaras dengan visi Gubernur yaitu : "Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban: keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Dalam upaya visinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan keselarasannya dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja Dinas yang berada di Ibukota negara dengan permasalahan nasional yang lebih kompleks.

Pernyataan visi yang dikemukakan di atas merupakan idealisme yang harus menjadi komitmen segenap pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkannya. Dengan pernyataan visi ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui keberadaan, peran, dan program instansi ini secara tepat.

B. Misi

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misinya selaras misi Gubernur no 2 (dua) dan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut: "Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang"

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

2.2. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan sebagai berikut: “Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta”

B. Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta.
2. Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing
3. Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

C. Strategi

Adapun strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai sasaran di atas, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan pangsa pasar regional dan internasional.
2. Peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat).
3. Peningkatan pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta.
4. Peningkatan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten serta kredibilitas kelembagaan yang profesional.
5. Penyediaan sentra dan ruang untuk konsultasi, inkubasi, dan transaksi bisnis di wilayah sesuai dengan tipologi usaha di wilayah dalam bentuk trading house, Pusat Inovasi, Galery Produk UKM, Pusat Kreatif.
6. Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan.
7. Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional.
8. Peningkatan diversifikasi produk ekspor
9. Pengintensifan kuantitas dan kualitas pengawasan perdagangan.
10. Peningkatan pelayanan tera/tera ulang.
11. Penguatan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen.

Sasaran dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tiap-tiap sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi visi, misi dan sasaran organisasi

Penyusunan program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Program Urusan Koperasi dan UKM serta Program Urusan Perdagangan di Tahun 2018 memiliki sedikit perbedaan dengan Tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan belum tersusunnya RPJMD 2018-2022 pada saat penyusunan Program Tahun 2018, sehingga penyusunan Program Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kebijakan inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada Tahun 2018 dengan Tahun 2019-2022, setelah RPJMD 2018-2022 tersusun.

Adapun Program Urusan Koperasi dan UKM serta Program Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Program untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun 2018:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Volume Usaha Koperasi
2. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM.
 - Indikator Program:

- a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
- 4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahun 2019 - 2022:

- 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
- 2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
 - Indikator Program:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
- 4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program untuk urusan Perdagangan Tahun 2018 antara lain:

- 1. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)
 - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
 - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
- 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan

- Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
- 3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program untuk urusan Perdagangan Tahun 2019 - 2022 antara lain:

1. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi
 - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
 - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
3. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Setelah penggabungan Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan dengan Bidang Perindustrian, Program dan Indikator bertambah dengan urusan Perindustrian.

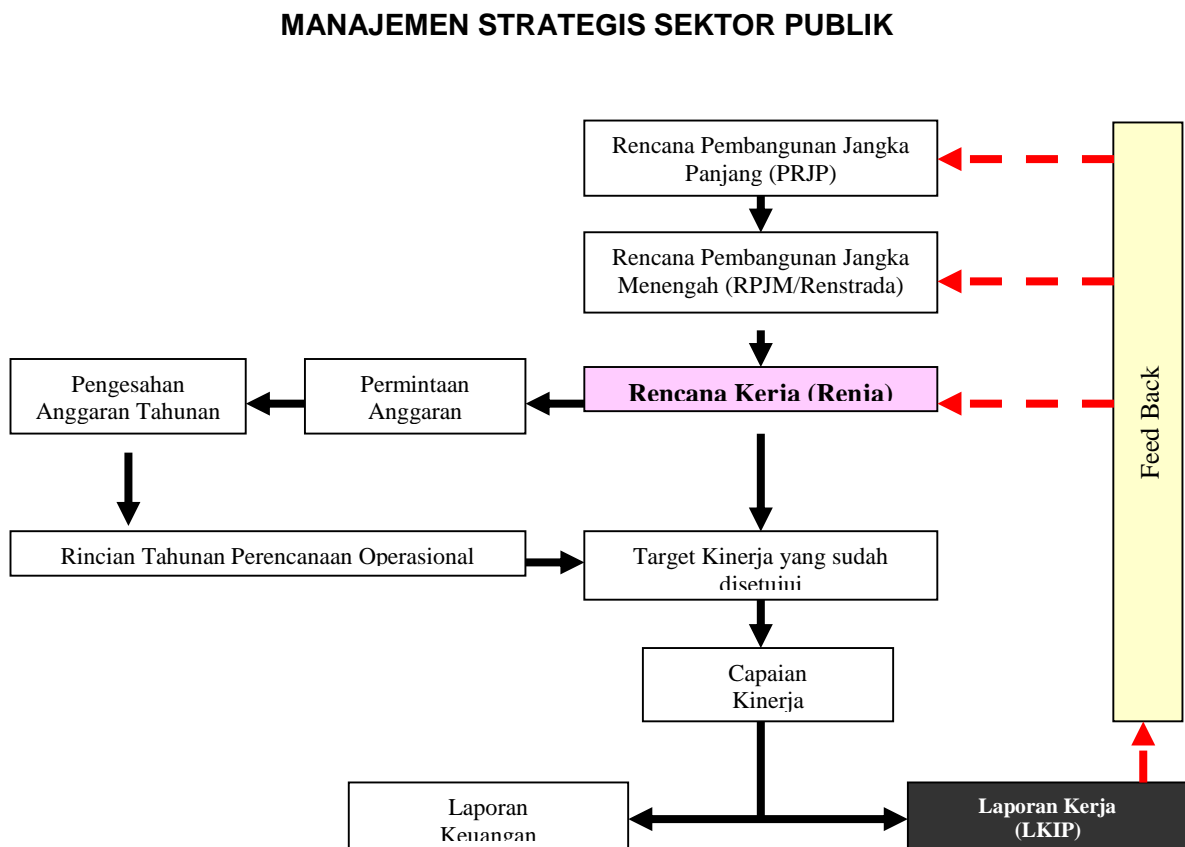
Adapun Program urusan Perindustrian adalah sebagai berikut:

Program untuk urusan Perindustrian Tahun 2020 - 2022 antara lain:

1. Program pembinaan dan Pengembangan Industri
 - Indikator Program
 - a. Jumlah wirausaha industri baru
 - b. Persentase jumlah IKM yang berkualitas
 - c. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
2. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - Indikator Program
 - a. Persentase produk industri dengan standar SNI
 - b. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Gambar 2.1: Diagram Alur Manajemen Strategis Sektor Publik



2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2020 ini juga merupakan komitmen dari segenap karyawan dan pejabat

di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Uraian mengenai Rencana Kinerja 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
DINAS PPKUKM		TOTAL DINAS PPKUKM	52.050.377.216	9.779.409.763
Bid. Pengawasan		TOTAL	1.288.063.539	-
Bid. Pengawasan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Partisipasi Pada Acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS)	78.888.590	-
Bid. Pengawasan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pelaksanaan Edukasi Masyarakat Konsumen Cerdas Dalam Penggunaan Produk/Jasa	194.680.299	-
Bid. Pengawasan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	215.367.130	-
Bid. Pengawasan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pengawasan Produk SNI Wajib	403.906.020	-
Bid. Pengawasan	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Peningkatan Pengawasan Industri di DKI Jakarta	219.125.000	-
Bid. Pengawasan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen	176.096.500	-
Bid. Perindustrian		TOTAL	19.769.023.387	710.821.759
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pelaksanaan Kurasi Produk IKM	81.750.000	12.000.000
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan industri kreatif	1.567.002.869	267.847.629
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan	2.479.636.200	50.200.000
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Pendaftaran Fasilitasi Sertifikasi Merk	1.561.710.000	15.000.000
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal	4.452.900.000	13.160.000
Bid. Perindustrian	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) pada sektor Industri	361.063.186	352.614.130
Bidang UKM		TOTAL	11.791.788.620	1.174.597.616
Bidang UKM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pengelolaan Jakarta Creative Hub (JCH)	2.144.268.659	1.130.597.616
Bidang UKM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Penyedia Jasa Kurator Kewirausahaan	249.792.500	44.000.000
Bidang Koperasi		TOTAL	451.291.539	38.500.000
Bidang Koperasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	160.880.000	38.500.000
Bidang Perdagangan		TOTAL	8.602.066.351	483.915.000

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
Bidang Perdagangan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Partisipasi Pameran Dalam Kota	3.567.105.033	287.580.000
Bidang Perdagangan	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Partisipasi Pameran Luar Kota	1.458.993.900	196.335.000
Sekretariat		TOTAL	10.148.143.780	7.371.575.388
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Pemeliharaan Taman Dinas	14.798.872	13.228.497
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Pengelolaan Sistem Informasi Dinas KUKMP	357.925.269	139.335.000
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	73.833.375	45.000.000
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan alat tulis kantor	99.965.800	99.588.500
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	113.459.940	98.173.500
Sekretariat	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	230.555.450	170.555.450
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.120.000	7.485.400
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	2.131.368.683	2.103.817.335
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	2.255.466.737	2.227.420.928
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal	110.084.704	58.769.022
Sekretariat	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	30.543.230	26.817.450
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	2.012.644.950	1.924.566.554
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan makanan dan minuman	910.016.566	138.848.301
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.918.202	40.765.671
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	189.258.780	184.638.780
Sekretariat	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan sewa mesin fotokopi	112.384.800	92.565.000

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
PUSDIKLAT		TOTAL	5.321.364.587	2.448.639.616
PUSDIKLAT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan	151.000.000	149.700.000
PUSDIKLAT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pelaksanaan Bimtek Pelayanan Prima Reparatif UTTP	40.748.000	39.448.000
PUSDIKLAT	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Pelatihan Diklat Dasar - dasar Perkoperasian	162.760.000	41.340.000
PUSDIKLAT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pelatihan Diklat Negosiasi Bisnis dan Manajemen Biaya Bagi UKM	225.067.720	38.352.000
PUSDIKLAT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pelatihan Kewirausahaan (DAK)	566.387.776	553.881.216
PUSDIKLAT	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP dan USP (DAK)	429.555.041	429.555.041
PUSDIKLAT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Koperasi dan UKM (DAK)A	301.500.000	301.500.000
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.073.000	2.073.000
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	366.225.750	365.946.130
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	237.659.102	234.838.064
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal	107.181.903	103.451.022
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	131.305.030	94.911.545
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan makanan dan minuman	70.146.700	20.218.598
PUSDIKLAT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan sewa mesin fotokopi	117.480.000	73.425.000
SUDIN PPKUKM KEP. SERIBU		TOTAL	10.584.305.547	1.508.976.306
SUDIN PPKUKM KEP. SERIBU	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha	1.282.997.331	764.786.248
SUDIN PPKUKM KEP. SERIBU	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan kewirausahaan di Wilayah Kepulauan Seribu	614.105.450	613.741.482

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
SUDIN PPKUKM KEP. SERIBU	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Kepulauan Seribu.	1.031.115.050	98.899.476
SUDIN PPKUKM KEP. SERIBU	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan sewa mesin foto copy untuk DKUKMP	35.900.700	31.549.100
SUDIN PPKUKM JAKBAR		TOTAL	19.095.316.411	10.742.454.483
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Barat	1.282.129.423	21.000.000
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Barat	753.548.487	48.000.000
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Barat	2.932.991.406	2.657.871.908
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Barat	2.481.563.729	2.478.697.745
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Barat	3.282.281.944	307.508.348
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan alat tulis kantor	49.977.026	49.846.500
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.231.353	16.053.125
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	57.531.157	28.000.000
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	2.399.834.502	2.350.760.862
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	2.399.559.887	2.350.760.862
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	4.132.500	4.132.500
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	392.454.876	377.337.026
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan makanan dan minuman	91.013.764	15.024.007
SUDIN PPKUKM JAKBAR	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37.461.600	37.461.600

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
SUDIN PPKUKM JAKPUS		TOTAL	20.030.709.012	10.044.925.297
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Pusat	1.118.501.440	45.600.000
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Pusat	3.042.338.446	2.672.149.044
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat	791.903.334	146.939.124
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat	3.266.048.294	210.634.814
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan alat tulis kantor	53.102.995	26.551.498
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.801.600	36.801.600
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.501.800	933.000
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	2.087.427.004	2.056.915.754
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.917.916.576	1.880.608.690
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	5.913.820	5.913.820
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	504.099.360	290.294.395
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan makanan dan minuman	56.073.800	32.850.000
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	28.380.000
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Pusat	2.468.705.942	2.465.813.558
SUDIN PPKUKM JAKPUS	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Pusat	2.530.907.610	144.540.000
SUDIN PPKUKM JAKSEL		TOTAL	20.482.442.460	10.171.788.982
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Selatan	6.806.831.287	6.303.728.753
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan	1.497.007.184	939.843.125

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
		Betawi Store di Wilayah Jakarta Selatan		
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Selatan	3.610.651.390	102.902.580
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.451.200	1.451.200
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	1.310.379.452	1.234.149.452
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.546.224.878	1.469.225.538
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	4.767.400	4.767.400
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air Listrik dan Internet	15.576.000	10.255.500
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan makanan dan minuman	39.503.834	5.003.834
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	37.461.600
SUDIN PPKUKM JAKSEL	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Selatan	3.295.301.570	63.000.000
SUDIN PPKUKM JAKTIM		TOTAL	26.107.457.207	14.716.879.458
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Timur	3.681.744.689	3.391.980.995
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Timur	3.133.711.253	3.119.713.973
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur	3.724.350.599	2.227.750.716
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Timur	3.700.669.900	288.492.915
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan alat tulis kantor	48.215.673	24.107.837

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.342.800	4.342.800
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	2.529.845.921	2.527.067.926
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	3.011.896.602	2.938.451.076
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	4.088.700	4.088.700
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	27.232.128	37.200.000
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan makanan dan minuman	111.372.920	27.197.920
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37.461.600	9.004.600
SUDIN PPKUKM JAKTIM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Timur	4.181.448.370	117.480.000
SUDIN PPKUKM JAKUT		TOTAL	15.771.932.519	7.536.819.345
SUDIN PPKUKM JAKUT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Utara	1.206.446.320	42.000.000
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Pendamping Kewirausahaan Industri di Wilayah Jakarta Utara	2.026.920.428	1.819.880.454
SUDIN PPKUKM JAKUT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pendampingan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Utara	2.264.247.723	2.095.552.653
SUDIN PPKUKM JAKUT	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Utara	1.441.951.288	781.618.099
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Di Wilayah Jakarta Utara	2.789.310.684	117.754.646
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Bahan Bakar KDO/KDO Khusus, Genset dan Peralatan Lainnya	17.548.660	7.311.945
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	684.200	600.000
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	1.430.053.765	1.390.456.517

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.211.505.179	1.208.952.731
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	866.300	866.300
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	18.120.000	18.120.000
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan makanan dan minuman	160.512.000	19.518.000
SUDIN PPKUKM JAKUT	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	34.188.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK		TOTAL	9.111.112.287	3.353.800.843
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi	17.855.013	8.927.507
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Uji	25.465.000	1.650.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji	44.427.000	44.427.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	39.687.830	39.687.830
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	727.099.753	342.269.620
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	pemeliharaan dan penyediaan suku cadang KDO/KDO Khusus dan genset	64.789.281	64.789.281
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi	23.730.608	23.730.608
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	206.735.481	115.471.759
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penanganan limbah laboratorium	16.753.000	16.753.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Laboratorium	371.853.060	160.600.889
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pengembangan Kemampuan Uji Personil Laboratorium	65.560.000	22.660.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan alat tulis kantor	49.994.267	38.337.132
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Penyediaan Bahan Bakar KDO/KDO Khusus, Genset dan Peralatan Lainnya	24.480.000	14.040.000

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64.268.765	59.851.000
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.539.500	2.539.500
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	366.807.694	366.807.694
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	331.047.075	331.047.075
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dan genset	3.453.900	3.453.900
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan	1.264.912.108	1.264.912.108
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	381.856.520	301.856.520
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan makanan dan minuman	226.992.612	106.175.620
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan sewa mesin fotokopi	34.056.000	23.812.800
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL		TOTAL	17.270.570.711	5.988.835.945
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi laboratorium pengujian	28.000.000	28.000.000
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji	42.325.000	4.725.000
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	172.239.440	45.479.040
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	542.928.920	271.464.460
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	47.668.445	21.367.696
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penanganan limbah laboratorium	83.083.330	83.083.330
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Laboratorium	1.258.559.057	621.811.805
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan alat tulis kantor	114.047.357	57.023.679
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.212.790	15.204.112
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	42.898.500	9.500.000

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.478.600	5.478.600
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	1.307.252.991	1.307.252.991
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.102.341.971	1.102.341.971
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	6.800.000	6.800.000
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Petugas Kantor/Lapangan	1.454.842.916	1.454.842.916
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.115.234.400	748.251.195
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan makanan dan minuman	227.893.380	121.763.380
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	295.090.094	50.389.770
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Penyediaan sewa mesin fotokopi	34.056.000	34.056.000
UPK PULOGADUNG		TOTAL	10.583.683.944	10.466.258.108
UPK PULOGADUNG	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Peningkatan Administrasi Layanan Umum Daerah UPK PPUKMP Pulogadung.	3.800.000.000	3.800.000.000
UPK PULOGADUNG	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	2.980.394.465	2.864.804.793
UPK PULOGADUNG	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	493.314.954	491.478.790
UPK PULOGADUNG	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	232.980.000	232.980.000
UPK PULOGADUNG	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Penyediaan Jasa Upah Pegawai Non ASN BLUD UPK PPUKMP Pulogadung	3.076.994.525	3.076.994.525
UNIT PENGELOLA METROLOGI		TOTAL	11.206.829.780	2.841.626.408

SKPD/UKPD/BIDANG	Program	NAMA KEGIATAN	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kemetrologian	16.650.000	1.650.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pemeliharaan Alat Uji Kemetrologian	6.916.184.000	65.274.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	286.277.343	44.436.392
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Kemetrologian	127.163.960	96.624.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	10.321.630	10.321.630
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Peningkatan Standarisasi Kemetrologian	163.320.762	163.320.762
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Penyediaan Alat Penunjang Kemetrologian	359.364.346	227.464.810
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan alat tulis kantor	49.999.131	49.114.368
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	240.270.041	186.648.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	105.366.640	60.000.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.902.000	2.902.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	133.214.576	65.000.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kemetrologian (PJLP)	1.807.357.306	1.763.070.646
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	29.628.200	29.628.200
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan makanan dan minuman	200.185.600	38.710.000
UNIT PENGELOLA METROLOGI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Penyediaan sewa mesin fotokopi	37.461.600	37.461.600
DINAS PPKUKM		GRAND TOTAL	217.616.101.681	89.600.414.554

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kewirausahaan baru	Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	33.359
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	73.280.444.369	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	48.937.355.771	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	2.897.779.532	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	19.557.934.794	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	16.731.628.393	APBD Provinsi DKI Jakarta
6	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	907.793.077	APBD Provinsi DKI Jakarta
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	272.100.842	APBD Provinsi DKI Jakarta
8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	221.294.067	APBD Provinsi DKI Jakarta
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	30.882.602.159	APBD Provinsi DKI Jakarta
10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	13.482.991.409	APBD Provinsi DKI Jakarta
11	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	10.444.177.268	APBD Provinsi DKI Jakarta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis struktur ekonomi menunjukkan bahwa dominasi terbesar masih pada sektor perdagangan dan jasa, bahkan persentasenya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah berusaha meningkatkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat tercipta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perindustrian dan perdagangan yang mandiri yang dapat menyerap angkatan kerja melalui pelaksanaan program-program kerja yang telah disusun.

3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 95,02 %, dengan Nilai Kinerja Sangat Memuaskan. Pada Tahun 2019 Indikator Kinerja yang masuk dalam Perjanjian Kinerja hanya satu yaitu Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan, sedangkan di Tahun 2020 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja dengan 1 (satu) di antaranya merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Indikator kinerja beserta target dan realisasi atas sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan perbandingannya dengan Tahun 2019 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian Ekuivalen	Nilai Kinerja
1	Meningkatnya Kewirausahaan Baru	Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan (2019)	UMKM	27.799	15.200	54,68%	33.359	85.746	257,04%	100,00%	CUKUP BAIK (2019)
		Peningkatan Pelaku Kewirausahaan (2020)									SANGAT MEMUASKAN (2020)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%				100%	95,02%	95,02%	95,02%	SANGAT MEMUASKAN (2020)
Rata-Rata Capaian Kinerja						54,68%			97,51%		CUKUP BAIK (2019)

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Tahun 2020 sebesar 257,04% lebih tinggi dibandingkan capaian Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Tahun 2019 sebesar 54,68%

Jika dibandingkan secara keseluruhan Rata – Rata Capaian Kinerja yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2020 juga lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 97,51%

Dalam mencapai Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, didukung dengan Program – Program sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM
3. Pengawasan dan pelayanan perdagangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
8. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
9. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
10. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
11. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian

Realiasi anggaran atas Target Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 (sebelas) Program mencapai 95,79%, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang terlihat dalam tabel berikut:

Realiasi anggaran atas Target Perjanjian Kinerja Dinas PPKUKM Tahun 2020

No.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	% Realisasi
1	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	2.897.779.532	509.395.041	478.275.400	93,89%
2	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	73.280.444.369	24.721.319.497	24.199.966.097	97,89%
3	Pengawasan dan pelayanan perdagangan	19.557.934.794	2.801.319.218	2.762.490.892	98,61%
4	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	48.937.355.771	12.334.861.750	12.067.294.316	97,83%
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	16.731.628.393	1.591.703.151	1.337.510.310	84,03%
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	30.882.602.159	28.164.848.065	26.328.867.677	93,48%
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	907.793.077	244.275.320	229.330.350	94,02%

No.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	% Realisasi
8	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	13.482.991.409	11.352.403.330	10.950.120.334	96,46%
9	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	272.100.842	89.628.200	68.729.300	76,68%
10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	10.444.177.268	7.683.899.556	7.320.874.892	95,28%
11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	221.294.067	106.761.426	85.574.260	78,66%
	TOTAL	217.616.101.681	89.600.414.554	85.829.033.828	95,79%

Sedangkan pada Tahun 2019, Realiasi anggaran atas Target Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan (sebelum bergabung dengan Bidang Perindustrian) yang terdiri dari 3 (tiga) Program mencapai 74,12%, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang terlihat dalam tabel berikut:

Realiasi anggaran atas Target Perjanjian Kinerja Dinas KUKMP Tahun 2019

No.	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	% Realisasi
1	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	3,606,842,152	3,606,842,152	3,395,954,400	94.15%
2	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	132,725,789,305	123,076,561,208	88,472,792,129	71.88%
3	Pengawasan dan pelayanan perdagangan	16,299,075,234	16,546,068,444	14,287,191,142	86.35%
	TOTAL	152,631,706,691	143,229,471,804	106,155,937,671	74.12%

Dalam mencapai Indikator Kinerja yang ada di dalam Perjanjian Kinerja yaitu Peningkatan Pelaku Kewirausahaan, Dinas PPKUKM melakukan rencana aksi berupa kegiatan :

1. Pembinaan Kewirausahaan dan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
Yaitu berupa kegiatan pelatihan – pelatihan soft skill dan hard skill yang diberikaan kepada masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru.
2. Pendampingan Kewirausahaan tingkat Kecamatan di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
Yaitu berupa kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk melewati 7 (tujuh) tahapan untuk dapat menjadi wirasuaha baru. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh tenaga pendamping di tingkat kecamatan dengan tahapannya sebagai berikut :

- a) Pendaftaran
Tahap Awal yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) agar peserta terdaftar dan terdata dalam sistem PKT DKI Jakarta
- b) Pelatihan
Peserta diberikan Materi Pelatihan tentang Kewirausahaan oleh Narasumber dari PGO dan IPB yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- c) Pendampingan
Dalam tahap ini para peserta PKT di berikan pendampingan di Kantor Kecamatan setiap hari Sabtu Pukul 08.00 – 11.00 WIB, selain itu Pendampingan dapat dilakukan juga dalam bentuk jemput bola ke tempat usaha UKM di Wilayah Binaan
- d) Perizinan
Dalam tahap Perizinan para PKT didampingi oleh pendamping dan Perizinan di keluarkan oleh PTSP tingkat Kelurahan tanpa dipungut biaya
- e) Pemasaran
Para Anggota PKT diberikan fasilitas untuk memasarkan Produk di Bazar-bazar yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, Kota ataupun Provinsi serta Event-event besar lainnya
- f) Pelaporan Keuangan
Dalam tahap ini para peserta / anggota PKT diberikan Pelatihan tentang pengelolaan keuangan suatu usaha agar usaha yang dijalankan dapat terus meningkat dan naik kelas dalam level usahanya
- g) Perizinan
Dalam tahapan ini para anggota PKT yang telah menyelesaikan 6 tahapan diberikan surat keterangan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman permodalan di Bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan untuk Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Tahun 2020 hanya sejumlah 85.746 UKM/IKM dari target 33.359 dengan nilai capaian sebesar 257,04 %.

Tingginya nilai capaian ini selain dari hasil kerja keras pegawai Dinas PPKUKM beserta pendamping, hal ini juga dikarenakan adanya perubahan definisi wirausaha baru menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Definisi Wirausaha Baru menurut Pergub tersebut adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau

jumlah tenaga kerja. Sehingga data realisasi peningkatan pelaku kewirausahaan tidak lagi berdasarkan data Perijinan tetapi berdasarkan data Pendaftaran. Karena peserta yang terdaftar ini akan didampingi atau diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu untuk peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Selain itu peserta yang terdaftar dapat mengikuti tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tanpa harus berurutan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan bergabung dengan Bidang Perindustrian sehingga Program dan Indikator Kinerja Program mengalami penambahan dari 7 Program dan 10 Indikator Kinerja Program menjadi 11 Program dan 17 Indikator Kinerja Program . Rata – rata Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM untuk Tahun 2020 mencapai nilai 96,99%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2019 yang hanya sebesar 92,97%. Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM untuk Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019, tercantum dalam tabel berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Ekuivalen
				2020	2020	2020	2020
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	120	125	104,17%	100,00%
2	Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	27.799	59.449	213,85%	100,00%
3	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi	Pasar	20	20	100,00%	100,00%
		persentase keluhan/ temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%	100,00%
		Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	98	82,15	83,83%	83,83%
		Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.166.452.963	8.775.826.509,30	210,63%	100,00%
4	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	5.560	26.297	472,97%	100,00%
		Persentase jumlah IKM yang berkualitas	Persen	12,66	18,39	145,26%	100,00%

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja Ekuivalen
				2020	2020	2020	2020
	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Persen	43,70	48,50	110,98%	100,00%
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	Persentase produk industri dengan standar SNI	Persen	76	90,77	119,43%	100,00%
		Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Persen	42,52	28,91	67,99%	67,99%
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor (Urusan KUKM)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor (Urusan Perdagangan)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
8	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor (Urusan Perindustrian)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional (Urusan KUKM)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional (Urusan Perdagangan)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional (Urusan Perindustrian)	Indeks	4	4	100,00%	100,00%
TOTAL RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM						96,99%	

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja
				2019	2019	2019
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	120	120	100 %
2	Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	27.799	15.200	54,68 %
3	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi	Pasar	18	18	100 %
		persentase keluhan/ temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100 %

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja
				2019	2019	2019
	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	97	190	100 %
		Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.125.200.954	5.963.633.980,61	100 %
4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor (Urusan KUKM)	Indeks	4	4	100 %
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor (Urusan Perdagangan)	Indeks	4	4	100 %
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional (Urusan KUKM)	Indeks	4	3	75 %
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional (Urusan Perdagangan)	Indeks	4	4	100 %
TOTAL RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM						92,97 %

Analisis hasil (outcome) dari pencapaian Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan kegiatan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi untuk memfasilitasi Koperasi dalam berbadan hukum serta adanya pendampingan terhadap Koperasi dalam pengajuan sertifikat NIK, yang menghasilkan 125 Koperasi bersertifikat NIK di Tahun 2020.
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Kewirausahaan di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan oleh tenaga pendamping yang menghasilkan 85.746 wirausaha baru yang terdiri dari 26.297 IKM dan 59.449 UKM.
- 3) Telah dilaksanakan pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 20 pasar.
- 4) Adanya tindak lanjut terhadap setiap keluhan konsumen yang masuk baik dari CRM maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebesar 100%.
- 5) Telah dilaksanakan kegiatan pelayanan kemetrolgian dan Sidang Tera Pasar sehingga cakupan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang terealisasi sebesar 82,15%
- 6) Telah dilaksanakan pelayanan dalam penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk

mendukung UKM dalam melakukan ekspor. Ekspor di Tahun 2020 berdasarkan SKA telah mencapai USD 8.775.826.509,30.

- 7) Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan dan Pendampingan Sertifikasi Halal yang mendukung Indikator Kinerja persentase jumlah IKM yang berkualitas dengan nilai realisasi sebesar 18,39%
- 8) Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Industri Kreatif yang mendukung Indikator Kinerja Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif dengan nilai realisasi sebesar 48,50%
- 9) Telah dilaksanakan kegiatan pelayanan pengujian produk industri dengan Standar SNI dengan nilai realisasi Indikator Kinerja sebesar 90,77%
- 10) Telah dilaksanakan pengawasan terhadap UKM/IKM kuliner yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Namun, nilai realisasi Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya hanya sebesar 28,91%, hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan kegiatan pembelian alat test kit untuk pengujian bahan makanan berbahaya tidak dapat dilakukan. Pengawasan hanya menggunakan sisa stok alat test kit tahun 2019.
- 11) Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional dari tiga urusan Koperasi dan UKM, urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian yang mencapai skala nilai 4 berdasarkan hasil survei kepuasan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Penyerapan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM beserta Sudin dan UPT untuk belanja langsung nya mencapai **Rp.85.829.033.828** atau **95,79%** dari **Rp.89.600.414.554** sedangkan penyerapan keseluruhan baik belanja langsung maupun tidak langsung mencapai **Rp.164.076.135.211** atau **91,95%** dari **Rp. 178.440.143.884**

REKAP PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

DINAS, UPT, SUDIN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama SKPD/UKPD	APBD	APBDP	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN thd APBDP
1	DINAS PPKUKM (BL+BTL)	200.277.289.036	98.619.139.093	87.711.915.548	88,94%
	DINAS PPKUKM (BTL)	148.226.911.820	88.839.729.330	78.247.101.383	88,08%
	DINAS PPKUKM (BL)	52.050.377.216	9.779.409.763	9.464.814.165	96,78%

No.	Nama SKPD/UKPD	APBD	APBDP	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN thd APBDP
2	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat	20.030.709.012	10.044.925.297	9.913.380.858	98,69%
3	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara	15.771.932.519	7.536.819.345	7.451.463.381	98,87%
4	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur	26.107.457.207	14.716.879.458	14.401.208.902	97,86%
5	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan	20.482.442.460	10.171.788.982	9.992.146.035	98,23%
6	Suku Dinas PPKUKM Jakarta Barat	19.095.316.411	10.742.454.483	10.429.869.934	97,09%
7	Suku Dinas PPKUKM Kepulauan Seribu	10.584.305.547	1.508.976.306	1.416.881.861	93,90%
8	PUSAT DIKLAT PPKUKM	5.321.364.587	2.448.639.616	2.389.904.825	97,60%
9	UP METROLOGI	11.206.829.780	2.841.626.408	2.768.002.860	97,41%
10	UPK PPUKMP Pulogadung	10.583.683.944	10.466.258.108	8.892.626.990	84,96%
11	UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	9.111.112.287	3.353.800.843	3.148.213.084	93,87%
12	UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	17.270.570.711	5.988.835.945	5.560.520.933	92,85%
	TOTAL BL	217.616.101.681	89.600.414.554	85.829.033.828	95,79%
	TOTAL BL + BTL	365.843.013.501	178.440.143.884	164.076.135.211	91,95%

**REKAP PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
DINAS, UPT, SUDIN KOPERASI, UKM, SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

SKPD/UKPD	APBD	APBD-P	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN thd APBDP
DINAS KUMKMP (BL+BTL)	180,545,067,466	146,893,207,640	131,523,019,918	89.54%
DINAS KUMKMP (BTL)	147,169,951,000	113,785,228,000	104,502,176,782	91.84%
DINAS KUMKMP (BL)	33,375,116,466	33,107,979,640	27,020,843,136	81.61%
Suku Dinas KUMKMP Jakarta Utara	22,568,497,397	22,568,497,397	12,162,311,618	53.89%
Suku Dinas KUMKMP Jakarta Timur	33,917,025,124	28,197,920,677	23,723,905,913	84.13%
Suku Dinas KUMKMP Jakarta Selatan	20,872,186,437	20,873,909,437	18,541,847,048	88.83%
Suku Dinas KUMKMP Jakarta Barat	23,338,782,131	23,338,782,131	20,506,128,949	87.86%
SKPD/UKPD	APBD	APBD-P	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN thd APBDP
Suku Dinas KUMKMP Jakarta Pusat	38,724,217,209	38,724,217,209	24,882,472,639	64.26%

PUSAT DIKLAT KUMKMP	7,605,344,117	7,605,344,117	7,206,330,776	94.75%
UP METROLOGI	10,081,922,167	10,365,337,167	8,946,669,343	86.31%
UPK PPUMKMP Pulogadung	12,162,901,077	13,364,803,604	11,667,112,872	87.30%
TOTAL (BL)	202,645,992,125	198,146,791,379	154,657,622,294	78.05%
TOTAL (BL+BTL)	349,815,943,125	311,932,019,379	259,159,799,076	83.08%

Penyerapan anggaran anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM beserta Sudin dan UPT di Tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dimana penyerapan belanja langsung nya di Tahun 2019 hanya mencapai 78,05% dan penyerapan keseluruhan baik belanja langsung maupun tidak langsung mencapai 83,08%

Tingginya serapan anggaran tersebut karena adanya pandemi covid yang membuat anggaran dioptimalisasi atau difocusing, sehingga anggaran APBDP dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, masih ada beberapa kegiatan yang penyerapannya kurang dari 50%, antara lain sebagai berikut :

1. Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Timur
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp 4.088.700 hanya terserap sebesar Rp 639.500 atau sebesar 15,64%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
2. Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 4.767.400 hanya terserap sebesar Rp 1.479.300 atau sebesar 31,03%, hal ini dikarenakan ada 1 unit Kendaraan Roda Empat pelimpahan atas ex Dinas Perindustrian tidak dapat dibayarkan karena tertunggak pajak selama 4 tahun.
3. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 44.427.000 hanya terserap sebesar Rp. 1.760.000 atau sebesar 3,96%. Kegiatan untuk akreditasi ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat Jadwal Akreditasi dari KAN untuk tahun 2020 dan hanya melaksanakan pembelian Buku SNI
4. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 4.725.000 hanya terserap sebesar Rp. 1.594.500

atau sebesar 33,75%, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan bentuk kegiatan hanya untuk pengadaan dokumen SNI dan tidak dapat terserap seluruhnya karena kendala dalam batas waktu pemesanan pengadaan dokumen tersebut.

- b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 5.478.600 hanya terserap Rp. 2.278.000 atau sebesar 41,58%, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran tersebut yang efisien dan sudah sesuai dengan kebutuhan jasa administrasi keuangan selama satu tahun.

5. UPT Balai Metrologi Provinsi DKI Jakarta

- a. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kemetrolgian dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 1.650.000 tidak dapat dilaksanakan karena belum ada surat panggilan untuk perpanjangan akreditasi dari KAN
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2020 sebesar Rp. 29.628.200 hanya terserap Rp. 8.729.300 atau sebesar 29,46%. Hal ini dikarenakan pembayaran STNK dan pajak telah sesuai dengan jumlah pajak STNK Kendaraan Dinas Operasional nya

3.4 Analisis Akuntabilitas Capaian Faktor Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator, yaitu: masukan (input), keluaran (ouput), hasil (outcome) dan manfaat (benefit). Penilaian tersebut terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan cara perhitungan sebagai berikut. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi penggambaran pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

Analisis akuntabilitas capaian kinerja yaitu dengan menganalisis kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian target.

Kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas dapat diperoleh dengan menggunakan skala pengukuran kinerja dalam hal ini skala pengukuran ordinal yaitu:

- AA** >90 – 100 = **Sangat Memuaskan**
A >80 – 90 = **Memuaskan**
BB >70 – 80 = **Sangat Baik**
B >60 – 70 = **Baik**, perlu sedikit perbaikan
- CC** >50 – 60 = **Cukup Baik** (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar,
C >30 – 50 = **Agak Kurang**, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
D >0 – 30 = **Kurang**, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Untuk mempermudah interpretasi analisis akuntabilitas capaian pada faktor-faktor penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka dilakukan penjumlahan rata - rata capaian kinerja faktor-faktor penyusun LKIP tersebut yang tersaji dalam tabel berikut:

No	FAKTOR		CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2019
1	Perjanjian Kinerja	Realisasi Target Perjanjian Kinerja	54,68%	97,51%
2		Realisasi Anggaran Target Perjanjian Kinerja	74,12%	95,79%
3	Program	Realisasi Indikator Kinerja Program	92,97%	96,99%
4	Keuangan	Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja	83,08%	91,95%
RATA-RATA CAPAIAN			76,21%	95,56%
KRITERIA			BB	AA

Berdasarkan perhitungan tabel di atas Capaian seluruh faktor penyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 sebesar 95,56% dengan kriteria AA (Sangat Memuaskan), meningkat dibandingkan Tahun 2019 yang hanya sebesar 76,21%

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Segala upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk mencapai sebuah visi yakni “Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Dalam mencapai visi tersebut, pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah merencanakan dan melaksanakan 11 (sebelas) program di APBDP 2020 yang meliputi:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
3. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
5. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
8. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
9. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
10. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
11. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian

Berdasarkan Analisis Akuntabilitas atas Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2020, maka dapat disampaikan simpulan bahwa Capaian seluruh faktor penyusun Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 sebesar 95,56%. Dengan demikian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berada pada level AA (Sangat Memuaskan).

Beberapa Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Tercapainya jumlah Koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK sebanyak 125 Koperasi dari target 120 Koperasi.
- 2) Tercapainya peningkatan pelaku kewirausahaan sebesar 85.746 wirausaha baru dari target 33.359 yang terdiri dari 26.297 IKM dan 59.449 UKM.
- 3) Tercapainya pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 20 pasar dari target 20 pasar.
- 4) Tercapainya persentase keluhan/ temuan konsumen yang ditindaklanjuti baik dari CRM maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebesar 100% dari target 100%.
- 5) Tercapainya jumlah ekspor di Tahun 2019 berdasarkan SKA sebesar USD 8.775.826.509,3. dari target USD 4.166.452.963
- 6) Tercapainya persentase jumlah IKM yang berkualitas dengan nilai realisasi sebesar 18,39% dari target 12,66%
- 7) Tercapainya Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif dengan nilai realisasi sebesar 48,50% dari target 43,70%
- 8) Tercapainya Persentase produk industri dengan standar SNI dengan nilai realisasi sebesar 90,77% dari target 76%
- 9) Tercapainya Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional dari tiga urusan Koperasi dan UKM, urusan Perdagangan dan urusan Perindustrian yang mencapai skala nilai 4 berdasarkan hasil survei kepuasan.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai maksimal adalah:

- 1) Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran di nol kan atau kurang maksimal dalam pelaksanaannya
- 2) Masih banyak pelaku wirausaha baru yang belum memiliki usaha atau perijinan
- 3) Adanya pembatasan kegiatan masyarakat dikarenakan pandemi covid sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Saran

Dalam mengatasi beberapa permasalahan di atas, beberapa saran sebagai usulan langkah

perbaiki, antara lain:

- 1) Pelaksanaan bimtek dan pelatihan secara online
- 2) Pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder seperti perguruan tinggi, marketplace, lembaga, perusahaan, maupun perorangan dalam penumbuhan kewirausahaan industri baru, industri kreatif dan IKM yang berkualitas
- 3) Pelaksanaan bazar secara online.

Diharapkan untuk ke depannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai sasaran strategis sesuai dengan tupoksinya.